

15 Jan 2010

Rabu, 19 Agustus 2009

OPINI

Pilkada 2010 dan Kepercayaan Politik

Hertanto

Pengajar FISIP Unila

Menjelang Pilkada Lampung 2010 suhu politik di beberapa kabupaten dan kota menghangat, setidaknya tidaknya itu yang muncul dalam liputan media massa setiap hari, baik cetak maupun elektronik.

Pilkada akan diselenggarakan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Way Kanan, dan Pesawaran. Ada kemungkinan juga pilkada akan diselenggarakan di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulangbawang Barat. Beberapa peminat di daerah-daerah itu, wajah lama atau wajah baru, telah meneguhkan diri sebagai bakal calon, baik sebagai kepala daerah ataupun sebagai wakil kepala daerah.

Namun, ada kecenderungan antusiasme para elit daerah itu tidak sebanding lurus dengan gairah masyarakat pemilih. Dari pengalaman beberapa pilkada sebelumnya, jumlah pemilih yang menggunakan haknya terus menurun atau jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya semakin meningkat dalam kisaran 30 persen--40 persen. Ini merupakan salah satu petunjuk (indikasi) semakin menurunnya tingkat kepercayaan politik (*political trust*) masyarakat. Apa soalnya? Ada banyak jawaban yang bisa dirunut dari berbagai sudut pandang, beberapa antara lain: (1) pilkada tidak menjawab harapan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, hanya elit politik yang diuntungkan secara sosial ekonomi, terutama yang sudah dan akan duduk di eksekutif dan legislatif; (2) masih tetap buruknya kinerja pemerintahan; (3) semakin meluasnya nepotisme dalam lingkaran keluarga pimpinan parpol dari tingkat pusat sampai ke daerah; dan (4) berkembangnya tradisi pewarisan jabatan politik secara turun temurun.

Pemilu dan pilkada selama ini bagi masyarakat dianggap hanya sebagai ajang kontestasi (pertunjukan) dan kompetisi ambisi para elit untuk mendapatkan kekuasaan semata. Pilkada belum menjadi solusi signifikan bagi persoalan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama golongan terbawah. Buruknya kinerja pemerintahan pada semua jenjang sering membuat frustrasi masyarakat yang membutuhkan layanan.

Di negara-negara anggota ASEAN lain, administrasi merupakan solusi dari berbagai persoalan pembangunan politik-pemerintahan; tapi di Indonesia, administrasi merupakan problem bagi masyarakat. Contoh paling mikro adalah membuat kartu tanda penduduk. Ini baru satu contoh. Masyarakat yang terkena jatah BLT diwajibkan bawa KTP, padahal tidak semua mereka mampu mengurus KTP. Mereka yang sudah punya KTP pun sering tidak dipercaya gara-gara KTP-nya dianggap sudah "habis masa berlakunya", padahal jelas-jelas nama dan foto di kartu itu adalah si pemilih yang membawanya. Tragis, ada warganegara yang tidak diakui oleh negaranya sendiri, gara-gara "tanpa identitas resmi".

Meluasnya nepotisme dalam lingkaran keluarga pimpinan parpol dari tingkat pusat sampai ke daerah bersumber pada pragmatisme politik. Akses terhadap fasilitas dari jabatan-jabatan politik membuat penetapan calon legislatif atau eksekutif lebih diprioritas dari keluarga sendiri. Hal yang sama juga pada tradisi pewarisan jabatan politik secara turun temurun; seperti menyiapkan putera mahkota untuk jabatan ketua partai atau jabatan-jabatan di lingkaran lembaga legislatif dan eksekutif. Persoalan ini mempersempit dan bahkan menutup akses hak politik yang setara bagi masyarakat awam untuk terlibat dalam kegiatan politik secara adil.

- Rubrik
- Utama
- Bandar Lampung
- Ruwa Jurai
- Bisnis
- Pendidikan
- Ekonomi
- Nasional
- Olahraga
- Politika
- Opini
- Hiburan
- Ragam
- Agrobisnis
- Seni Budaya
- Fokus
- Profil
- Dunia Anak
- Keluarga
- Kesehatan
- Apresiasi
- Traveling
- International
- euro2008
- Suplemen
- Dunia Kampus
- Bintang Pelajar
- Teknologi
- Properti
- Otomotif
- Xin Wen
- Ponsel
- Pesona Lampung
- Sumpah Pemuda
- KPK Versus Polri
- Refleksi
- Catatan 2009
- Mengenang Gus Dur
- Kabinet Indonesia Bersatu II
- Lampung Post
Terbit sejak 10 Agustus 1974
- Info
- Profil Perusahaan
- Cari Berita



Berita La

Energi unt
Depan

NUANSA
Kok Belur

TAJUK: S
Bekerja D

POJOK

SMS INT

SURAT P

Kepercayaan Politik Masyarakat

Kepercayaan politik adalah rasa percaya dan rasa nyaman masyarakat dalam melihat perbedaan pandangan di antara mereka (sesama kelompok politik yang bersaing) dan dalam menghormati institusi politik yang ada, seperti legitimasi atas pemerintahan yang tengah berkuasa (meminjam istilah *level of trust* dari Denny, JA, 2006: 156). Misalnya, seberapa jauh kelompok atau individu (calon) yang bersaing dalam pilkada tetap terikat kepada komitmen dan kepentingan bersama.

Perbedaan tidak harus menjadi permusuhan yang ingin saling memusnahkan, dan kompetisi tidak harus menjadi konflik yang tak berkesudahan serta berujung pada kekerasan. Masyarakat percaya bahwa siapa pun yang memenangkan kompetisi tetap terikat pada aturan main yang ada. Masyarakat juga percaya bahwa selalu ada ruang bersama yang dapat menjadi landasan bagi kerja sama antarkelompok yang berbeda dan beragam.

Kepercayaan politik juga mempertanyakan seberapa jauh sistem dan institusi pemerintahan yang ada mewakili rasa keadilan masyarakat. Warga umumnya percaya bahwa kekuasaan yang dipinjamkan ke pemerintahan akan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum, dengan memperhatikan kaidah-kaidah moral, hukum, dan hak asasi. Juga adanya rasa percaya kepada integritas pemimpin. Makin tinggi kepercayaan politik dalam kesadaran publik makin stabil dan damai masyarakat.

Rasa percaya yang tinggi atas institusi negara dan kelompok politik membuat kerukunan lebih mudah digalang, lebih harmoni, dan masyarakat makin produktif, karena makin rendahnya konflik dan kekerasan. Pemerintahan yang stabil adalah pemerintahan yang dipercayai publiknya. Kompetisi politik yang sehat adalah jika para peserta percaya pada aturan main dan niat baik para peserta, calon, serta pelaksana (KPU).

Rendahnya kepercayaan politik berhubungan langsung dengan perasaan terancam dan rasa dizalimi, seperti perlakuan tidak adil, sewenang-wenang. Ujung dari perasaan itu adalah aksi protes, kekerasan, dan kemarahan kolektif. Misalnya, protes diam dan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (pilpres, pemilu legislatif, pilgub, dan pilkada). Bagaimana kita bisa aman jika merasa bahwa kelompok politik yang bersaing atau institusi pemerintahan yang ada hendak menzalimi kita? Sebab itu, salah satu faktor penyebab terjadinya kerusuhan dalam pemilu dan pilkada adalah menurunnya kepercayaan politik masyarakat ini, baik kepada sesama kelompok politik atau individu (calon) yang bersaing maupun ke lembaga pemerintahan. Akibatnya, panggung pemilu/pilkada dijadikan sebagai arena untuk mengekspresikan rasa ketakutan, ketidakpuasan, dan kemarahan kolektif itu. Berbagai pemicu (misalnya, seperti arogansi kekuasaan dan sara) akan dengan mudah meletupkan perasaan itu menjadi kerusuhan dan kekerasan. Semoga kita dan semua pihak yang terkait akan mawas diri.

 [Cetak Berita](#)

(Artikel ini telah diterbitkan oleh surat kabar harian Lampung Post pada halaman 16: Opini, Rabu 19 Agustus 2009).

URL: Repository Unila

Naskah Asli

PILKADA LAMPUNG 2010 DAN KEPERCAYAAN POLITIK

Oleh: Hertanto
Pengajar FISIP Unila dan
Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia

Menjelang Pilkada Lampung 2010 suhu politik di beberapa kabupaten dan kota mulai menghangat, setidaknya-tidaknya itu yang muncul dalam liputan media massa setiap hari, baik cetak maupun elektronik. Pilkada akan diselenggarakan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Way Kanan, dan Pesawaran. Ada kemungkinan juga pilkada akan diselenggarakan di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulangbawang Barat. Beberapa peminat di daerah-daerah itu, wajah lama atau wajah baru, telah meneguhkan diri sebagai bakal calon, baik sebagai kepala daerah ataupun sebagai wakil kepala daerah.

Namun ada kecenderungan antusiasme para elit daerah itu tidak sebanding lurus dengan gairah masyarakat pemilih. Dari pengalaman beberapa pilkada sebelumnya, jumlah pemilih yang menggunakan haknya terus menurun atau jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya semakin meningkat dalam kisaran 30-40%. Ini merupakan salah satu petunjuk (indikasi) semakin menurunnya tingkat kepercayaan politik (*political trust*) masyarakat. Apa soalnya?

Ada banyak jawaban yang bisa dirunut dari berbagai sudut pandang, beberapa antara lain: (1) pilkada tidak menjawab harapan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, hanya elit politik yang diuntungkan secara social ekonomi, terutama yang sudah dan akan duduk di eksekutif dan legislative; (2) masih tetap buruknya kinerja pemerintahan; (3) semakin meluasnya nepotisme dalam lingkaran keluarga pimpinan parpol dari tingkat pusat sampai ke daerah; dan (4) berkembangnya tradisi pewarisan jabatan politik secara turun temurun.

Pemilu dan Pilkada selama ini bagi masyarakat dianggap hanya sebagai ajang kontestasi (pertunjukan) dan kompetisi ambisi para elit untuk mendapatkan kekuasaan semata. Pilkada belum menjadi solusi signifikan bagi persoalan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama golongan terbawah. Buruknya kinerja pemerintahan pada semua jenjang sering membuat frustrasi masyarakat yang membutuhkan layanan. Di Negara-

negara anggota Asean lain, administrasi merupakan solusi dari berbagai persoalan pembangunan politik-pemerintahan; namun di Indonesia, administrasi merupakan problem bagi masyarakat. Contoh paling mikro adalah bikin kartu tanda penduduk. Ini baru satu contoh. Masyarakat yang terkena jatah BLT diwajibkan bawa KTP, padahal tidak semua mereka mampu mengurus KTP. Mereka yang sudah punya KTP pun sering tidak dipercaya gara-gara KTP-nya dianggap sudah “habis masa berlakunya”, padahal jelas-jelas nama dan foto di kartu itu adalah si pemilik yang membawanya. Tragis, ada warganegara yang tidak diakui oleh negaranya sendiri, gara-gara “tanpa identitas resmi”.

Meluasnya nepotisme dalam lingkaran keluarga pimpinan parpol dari tingkat pusat sampai ke daerah bersumber pada pragmatisme politik. Akses terhadap fasilitas dari jabatan-jabatan politik membuat penetapan calon legislative atau eksekutif lebih diprioritas dari keluarga sendiri. Hal yang sama juga pada tradisi pewarisan jabatan politik secara turun temurun; seperti menyiapkan putera mahkota untuk jabatan ketua partai atau jabatan-jabatan di lingkaran lembaga legislative dan eksekutif. Persoalan ini mempersempit dan bahkan menutup akses hak politik yang setara bagi masyarakat awam untuk terlibat dalam kegiatan politik secara adil.

Kepercayaan Politik Masyarakat

Kepercayaan politik adalah rasa percaya dan rasa nyaman masyarakat dalam melihat perbedaan pandangan di antara mereka (sesama kelompok politik yang bersaing) dan dalam menghormati institusi politik yang ada, seperti legitimasi atas pemerintahan yang tengah berkuasa (meminjam istilah *level of trust* dari Denny, JA, 2006: 156). Misalnya, seberapa jauh kelompok atau individu (calon) yang bersaing dalam pilkada tetap terikat kepada komitmen dan kepentingan bersama. Sehingga perbedaan tidak harus menjadi permusuhan yang ingin saling memusnahkan, dan kompetisi tidak harus menjadi konflik yang tak berkesudahan serta berujung pada kekerasan. Masyarakat percaya bahwa siapapun yang memenangkan kompetisi tetap terikat pada aturan main yang ada. Masyarakat juga percaya bahwa selalu ada ruang bersama yang dapat menjadi landasan bagi kerjasama antarkelompok yang berbeda dan beragam.

Kepercayaan politik juga mempertanyakan seberapa jauh sistem dan institusi pemerintahan yang ada mewakili rasa keadilan masyarakat. Warga umumnya percaya bahwa kekuasaan yang dipinjamkan ke pemerintahan akan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum, dengan memperhatikan kaidah-kaidah moral, hukum, dan hak asasi. Juga adanya rasa percaya kepada integritas pemimpin. Makin tinggi kepercayaan politik dalam kesadaran publik makin stabil dan damai masyarakat. Rasa percaya yang tinggi atas institusi Negara dan kelompok politik membuat kerukunan lebih mudah digalang, lebih harmoni, dan masyarakat makin produktif, karena makin rendahnya konflik dan kekerasan. Pemerintahan yang stabil adalah pemerintahan yang dipercayai publiknya. Kompetisi politik yang sehat adalah jika para peserta percaya pada aturan main dan niat baik para peserta, calon, serta pelaksana (KPU).

Rendahnya kepercayaan politik berhubungan langsung dengan perasaan terancam dan rasa dizalimi, seperti perlakuan tidak adil, sewenang-wenang. Ujung dari perasaan itu adalah aksi protes, kekerasan, dan kemarahan kolektif. Misalnya, protes diam dan tidak

menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (pilpres, pileg, pilgub, dan pilkada). Bagaimana kita bisa aman jika merasa bahwa kelompok politik yang bersaing atau institusi pemerintahan yang ada hendak menzalimi kita?

Karena itu, salah satu faktor penyebab terjadinya kerusuhan dalam pemilu dan pilkada adalah menurunnya kepercayaan politik masyarakat ini, baik kepada sesama kelompok politik atau individu (calon) yang bersaing maupun ke lembaga pemerintahan. Akibatnya, panggung pemilu/pilkada dijadikan sebagai arena untuk mengekspresikan rasa ketakutan, ketidakpuasan, dan kemarahan kolektif itu. Berbagai pemicu (misalnya, seperti arogansi kekuasaan dan SARA) akan dengan mudah meletupkan perasaan itu menjadi kerusuhan dan kekerasan.

Semoga kita dan semua pihak yang terkait akan mawas diri.

hertanto.1960@fisip.unila.ac.id